

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2013-2015)

Muchlisa Faradilla Baihaqqi

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Yogyakarta
Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Kotak Pos 1123 Yogyakarta 55182

Abstract

The purpose of this research is to analyze the effect of Local Governance Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on Regional Expenditures of Districts and Cities in Central Java Province the periode 2013-2015.

The data used in the research is secondary data with collection methods of documentation sample used in this research is the whole Districts and Cities in Central Java Province which consists of 29 Districts and 6 Cities.

The result showed that the Special Allocation Fund did not effect and not significant on Regional Expenditures it is evident from the significant value of 0,899, while Local Governance Revenue and General Allocation Fund have possitive effect and significant on Regional Expenditures it is evident from the significant value of 0,000 with significant level of 0,05.

Keywords : Local Governance Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Regional Expenditures.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap anggaran belanja daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada periode 2013 sampai 2015.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pengumpulan data yang menggunakan metode dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran Belanja Daerah hal ini dibuktikan dari hasil nilai signifikansi sebesar 0,899, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan tingkat signifikan 0,05.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah.

A. Pendahuluan

Manajemen Pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan ini berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 (direvisi menjadi Undang-

undang No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah memisahkan dengan tegas antara fungsi Pemerintah Daerah (Legeslatif). Berdasarkan perbedaan tersebut, menunjukkan bahwa antara legeslatif dan

eksekutif terjadi hubungan keagenan. Pada Pemerintahan, peraturan perundang-undangan Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, yang mulai dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001 merupakan kebijakan yang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, dalam pengembangan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antardaerah. Kebijakan ini menyebabkan setiap daerah harus mampu membiayai anggaran daerahnya. Dalam membiayai anggaran daerah, Pemerintah pusat dapat membantu dengan menambahkan dana perimbangan dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, selain itu Pemerintah daerah juga dapat berupaya dengan meningkatkan pajak asli daerah dari Pendapatan Asli Daerah.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan sebagian besar wewenang dari Pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah untuk digunakan dalam alokasi belanja daerah. Dalam pengalokasiannya juga harus sesuai dengan asas kebutuhan, kepatuhan dan kemampuan daerah yang terdapat dalam anggaran daerah. Dalam pengalokasian sumberdaya dan pembiayaan untuk masing-masing daerah maka dibuatlah Anggaran Daerah dan Belanja Daerah.

Anggaran daerah dan Belanja daerah adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang disetujui oleh DPRD. Menurut

secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legeslatif dan publik.

Permendagri nomor 13 Tahun 2006, Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Adapun pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Untuk memenuhi kebutuhan dan untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah daerah harus disertai dengan memaksimalkan pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah yang meliputi peningkatan atau penggalian pajak daerah dan retribusi daerah. Selain dari PAD yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dapat juga dari bagian Dana Perimbangan, serta lain-lain Pendapatan yang sah seperti Dana Hibah dan Dana Darurat. Dalam menyediakan fasilitas pemerintah daerah dibantu oleh Pemerintah pusat dengan memberikan dana perimbangan untuk daerah. Pendapatan asli daerah saja belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah, maka dari itu Pemerintah pusat memberikan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

DAU merupakan dana yang berasal dari Pempus yang diambil dari APBN yang diberikan kepada masing-masing daerah, dan dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah masing-masing guna memenuhi segala kebutuhan pengeluaran Pemda dalam rangka desentralisasi. Pemberian DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus di suatu daerah yang merupakan kepentingan

daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional.

B. Batasan Masalah

Laporan realisasi APBD pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah PAD, DAU, dan DAK dilihat secara parsial dapat berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah?
2. Seberapa besar hasil pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Daerah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara Parsial?
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Daerah?

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis sehubungan tentang pengaruhnya PAD, DAU dan DAK terhadap belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Pemerintah
Untuk Pemda supaya dapat mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, DAU dan DAK guna untuk kelancaran proses belanja daerah.

Semoga penelitian ini mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang ada di daerah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

F. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah
Pergantian pemerintah dari orde baru menjadi pemerintah reformasi merupakan sebuah peluang untuk melakukan reformasi didalam segala macam bidang, misalnya

bidang politik, ekonomi, sosial serta budaya. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kebijakan dari masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Terlaksananya otonomi daerah, terjadi melalui proses pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah yang di implementasikan kebijakan desentralisasi memerlukan beberapa faktor pendukung, salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah yaitu kemampuan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan wewenang yang dimiliki.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah (*capital investment*) antara lain berasal dari PAD dan Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

2. Anggaran Daerah dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, karena merupakan rencana keuangan tahunan pemda yang disetujui bersama oleh pemda dan DPRD dan ditetapkan dengan perda.

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu mengambil keputusan, perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemus dan pemda, sumber-sumber penerimaan dalam APBD terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan (PAD, Bagian Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan yang sah)
- b. Anggaran belanja, yaitu belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah.
- c. Pinjaman daerah, terdiri dari pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri.
- d. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang erlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik itu pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun untuk tahun-tahun anggaran berikutnya.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan dari semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan asli yang dipisahkan dan pendapatan lain yang sah. Pendapatan asli daerah

merupakan salah satu dari komponen sumber pendapatan daerah yang telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan yang diberikan oleh masyarakat berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Kemampuan suatu daerah dalam memperoleh pendapatan dari hasil daerahnya sangat tergantung dari pemda mampu menggali potensi ekonomi suatu daerah untuk menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan untuk proses pembangunan daerah tertentu.

Jenis pendapatan yang diklasifikasikan sebagai PAD adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan langsung yang seimbang. Adapun macam-macam dari pajak daerah menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, reklame, penerangan jalan, pajak air dan tanah, dan pajak bumi dan bangunan.
- b. Retribusi Daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat. Terdapat tiga macam retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada (BUMN), dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, penerimaan komisi, pendapatan denda pajak dan pendapatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendapatan dari angsuran.

4. Dana Alokasi Umum

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemda sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pempus berupa dana bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer pemerintah ini menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah yang mana semakin besar dana alokasi umum yang diterima oleh pemda, maka hal tersebut menunjukkan daerah masih bergantung pada pempus.

Dalam APBN anggaran DAU termasuk ke dalam bagian belanja atau pengeluaran dari pemerintah pusat, sedangkan dalam APBD

anggaran untuk DAU merupakan salah satu komponen dari pendapatan untuk penerimaan daerah. Jumlah penerimaan DAU setiap tahunnya ditetapkan oleh presiden dan penerimaannya setiap daerahnya berbeda-beda, jal tersebut sudah diatur oleh peraturan pemda. DAU yang diberikan kepada daerah ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk daerah propinsi dan KABUPATEN/Kota ditetapkan masing-masing sebesar 10% dan 90%. Pembagian DAU dilakukan dengan memperhatikan potensi daerah (PAD, PBB, BPHTB, bagian daerah dari penerimaan (SDA), dan kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah tersedianya dana APBN.

5. Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-undang No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Dana Alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN. Dana alokasi khusus merupakan transfer dana perimbangan yang dialokasikan kepada pemda tertentu dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemda dan yang sesuai dengan prioritas nasional atau kegiatan yang tidak terdapat di daerah lain dan harus didampingi dengan dana pendamping yang bersumber dari penerimaan umum APBD. Dana alokasi khusus juga digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas

pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan atau perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah dapat menerima DAK, apabila memenuhi tiga kriteria yaitu :

- a. Kriteria umum berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang terlihat dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi dengan belanja PNSD.
- b. Kriteria khusus yang pengalokasiannya berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi khusus dan juga karakteristik daerah.
- c. Kriteria teknis yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana

Sesuai dengan undang-undang yang disebut kebutuhan khusus daerah meliputi kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya, misalkan kebutuhan dikawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis prestasi atau prasarana baru dan pembuatan jalan di daerah terpencil.

6. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemda pada satu periode anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun sudah disusun hampir secara

bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Alokasi belanja daerah dikelompokkan menjadi dua jenis yang terdiri dari :

a. Belanja langsung yaitu belanja yang anggarannya terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

b. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang anggarannya tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

G. Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini hanya pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2015.

H. Jenis dan Desain Penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis data sekunder bersumber dari dokumen yang berupa laporan realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah menggunakan data yang diperoleh dari dokumen

laporan relisasi APBD Tahun 2013-2015.

I. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability Sampling dengan menggunakan metode pendekatan *purposive sampling* atau sampel jenuh. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah yang terdapat dalam laporan realisasi APBD dari Tahun 2013 sampai 2015.

J. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen

Variabel dalam penelitian ini adalah belanja daerah yang menggunakan belanja daerah secara lengkap yaitu terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Permendagri 13 Tahun 2006 belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2. Variabel Independen

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :PAD, DAU dan DAK.

K. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Uji Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran berupa informasi atau penjelasan mengenai data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi.
2. Uji Kualitas Data (uji asumsi klasik), yang terdiri dari :
 - a. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi residual terdapat data distributor normal atau tidak.
 - b. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan

pengganggu periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya).

- c. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen.
 - d. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.
3. Hasil hipotesis dan analisis data
 - a. Metode regresi linear bergandadigunakan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$
 - b. Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual bisa berpengaruh terhadap variabel dependen.
 - c. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
 - d. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

L. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Uji Deskriptif

- a. Belanja daerah : nilai maksimum 3.612.895.000, nilai minimum 617.028.000, nilai mean 1.55E9, standar deviasi 4.928E8.
- b. PAD : nilai maksimum 1.052.732.000, nilai minimum 67.830.000, nilai mean 1.78E8, standar deviasi 1.349E8.
- c. DAU : nilai maksimum 1.332.537.000, nilai minimum 358.332.000, nilai mean

- 8.48E8, standar deviasi 2.267E8.
- d. DAK : nilai maksimum 110.204.000, nilai minimum 3.750.000, nilai mean 61512476,19, standar deviasi 1,846E7.
2. Uji Normalitas

Uji normalitas terhadap residual menunjukkan besar *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,970 > *Sig* 0,05, maka dalam uji ini dinyatakan sudah memenuhi asumsi normalitas.
 3. Uji Autokorelasi

Jumlah sampel sebanyak 105(n), jumlah variabel independen 3(k), dengan melihat tabel DW, nilai d_L 1.623, nilai d_U 1.741 dengan tingkat signifikansi 0,05, dari hasil tersebut dapat dibandingkan $DU 1.741 \geq 1.458 \geq 2.259$. Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan terdapat masalah autokorelasi positif dalam model regresi.
 4. Uji multikolinearitas
 - a. Metriks korelasi

Hasil uji Menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai korelasi cukup tinggi yaitu PAD dan DAK dengan tingkat korelasi masih dibawah 95% yaitu sebesar -0.176 atau sekitar 17.6%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
 - b. Nilai *tolerance* dan VIF

Menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau 10%, dan juga tidak ada nilai VIF lebih dari 10, dapat disimpulkan bahwa diantara variabel tersebut tidak ada korelasi dan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.
 5. Uji heteroskedastisitas

Nilai signifikansi variabel independen lebih besar dari nilai *Sig*. 0,05 yaitu nilai PAD sebesar 0.217, nilai DAU sebesar 0.954, dan nilai DAK sebesar 0.574, maka dalam model regresi tersebut dapat dikatakan bebas dari masalah heteroskedastisitas.
 6. Analisis regresi linear berganda

Menunjukkan bahwa arah pengaruh dari variabel independen PAD, DAU dan DAK terhadap variabel dependen Belanja Daerah disimpulkan bahwa hanya variabel PAD dan DAU saja yang memiliki pengaruh positif atau signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan variabel DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berikut perhitungan persamaan regresi berganda :

$$BM = -5.706E7 + 1.702 \text{ PAD} + 1.550 \text{ DAU} + (-116) \text{ DAK} + e$$
 - a. Konstanta sebesar - 5.706E7. variabel independen dianggap konstan, nilai mean belanja daerah -5.706E7.
 - b. Koefisien regresi variabel PAD 1.702, setiap penambahan PAD akan meningkatkan pengalokasian anggaran belanja daerah sebesar 1.702.
 - c. Koefisien regresi variabel DAU 1.550, setiap penambahan DAU akan meningkatkan pengalokasian anggaran belanja daerah sebesar 1.550
 - d. Koefisien regresi variabel DAK -0.116, setiap penambahan DAK tidak selalu mempengaruhi atau meningkatkan anggaran belanja daerah.
 7. Hasil uji t

Hasil Koefisien Regresi dan Uji Nilai t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-5.706E7	4.298E7		-1.327	.187
PAD	1.702	.101	.466	16.869	.000
DAU	1.550	.079	.713	19.731	.000
DAK	-.116	.918	-.004	-.127	.899

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 17.0

- a. Pengaruh variabel PAD terhadap Belanja Daerah (H_1)

Diperoleh nilai Koefisien sebesar 1.702, dengan nilai t sebesar 16.869, dan tingkat signifikansi (0.000) $< \alpha(0,05)$, sehingga disimpulkan bahwa hipotesis (H_1), PAD dapat diterima karena mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah.

- b. Pengaruh variabel DAU terhadap Belanja Daerah (H_2)

Diperoleh nilai Koefisien sebesar 1.550, dengan nilai t sebesar 19.731 tingkat signifikansi (0.000) $< \alpha(0,05)$, sehingga disimpulkan bahwa hipotesis (H_2) DAU dapat diterima karena mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pada pemerintah daerah.

- c. Pengaruh variabel DAK terhadap Belanja Daerah (H_3)

Diperoleh nilai Koefisien sebesar (-116), dengan nilai t sebesar (-127), tingkat signifikansi (0,899) $> \alpha(0,05)$, sehingga disimpulkan bahwa hipotesis (H_3) DAK ditolak karena tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

8. Hasil uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2.412E19	3	8.040E18	711.476	.000 ^a
Residual	1.141E18	101	1.130E16		
Total	2.526E19	104			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

10 Hasil Uji Nilai F

Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 17.0

Dihasilkan nilai F sebesar 711.476, dengan nilai signifikansi sebesar (0.000), hal ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau nilai Sig F (0.000) $> \alpha(0,05)$, maka dalam model regresi menunjukkan bahwa variabel independen PAD, DAU DAK terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen Belanja Daerah. Berdasarkan hasil uji F tersebut dapat disimpulkan bahwa penggabung variabel PAD, DAU DAK dikatakan relevan untuk memprediksi belanja daerah pada kabupaten/kota provinsi jawa tengah dimasa mendatang.

9. Koefisien determinasi

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977 ^a	.955	.953	1.063E8

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 17.0

Berdasarkan dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien (Adjusted R^2) adalah sebesar 0.953, yang berarti bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu sebesar 95,3%, sedangkan sisanya 4,7% dapat

dijelaskan oleh variabel lain yang diluar variabel independen yang diteliti dan tidak masuk dalam model regresi penelitian.

M. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari hipotesis pertama, kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahwa :

1. Dilihat secara parsial variabel PAD dan DAU memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai Sig (0,899) \geq nilai Sig. (0,05)
2. Secara simultan dapat dikatakan variable independen berpengaruh terhadap belanja daerah.
3. Dalam uji autokorelasi terdapat autokorelasi positif atau masalah autokorelasi dalam model regresi, dikarenakan dari hasil nilai *Durbin Watson* sebesar 1.458. hasil tersebut dapat dibandingkan bahwa $DU 1,741 \geq 1,458 \geq 2,259$, maka dalam model regresi tersebut tidak baik dalam uji autokorelasi.

N. Saran

1. Bagi peneliti :
Menambahkan tahun periode penelitian dan menambah variabel independennya yang sekiranya juga berpengaruh terhadap belanja daerah.
2. Bagi pemerintah :
Pemda diharapkan sebaiknya mengoptimalkan segala pengeluaran daerah yang sekiranya penting bagi kebutuhan publik dan masyarakat, dan menyampingkan kebutuhan lain yang sekiranya tidak terlalu penting.

O. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Sampel yang digunakan masih terbatas dalam kriteria tertentu yang hanya sebatas pada pemerintah kabupaten/kota provinsi jawa tengah saja.
2. Dalam penelitian ini tidak memberikan secara rinci alokasi penggunaan DAU, DAK dalam penyusunan anggaran belanja daerah, manakah yang memberikan kontribusi besar.

P. Tindak Lanjut

Dari hasil penelitian ini masih banyak kekurangan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dan juga memberikan bukti empiris yang lebih akurat dan relevan.

Q. Daftar Pustaka

- Akyunindya, Estrita. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa)". *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Cahyono dan Penatari. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Wilayah Jawa Tengah)". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Surakarta.
- Darise, Nurlan. 2006. "Pengelolaan Keuangan Daerah", *Indeks*, 2006
- Halim, Abdul. 2002. "Akuntansi Keuangan Daerah". Edisi 2, Salemba 4, Jakarta.
- Kolinug, Kumenaung dan Rotinsulu. 2013. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kota Manado)". *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, Universitas Sam Ratulangi.

- Maimunah, Mutiara. 2006. "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Sumatra)". *SNA* 9, Padang.
- Mardiasmo. 2002. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Edisi 1, Andi, Yogyakarta.
- Masdjojo, Gregorius N dan Sukartono. 2009. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect pada Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2006-2008". *Skripsi*, Universitas Stikubank. Vol.6. Edisi 1 Maret. Hal. 32-50.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris pada Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI*, Vol.8. No.2. Desember.
- Prakosa, Rendy Yulian Bayu. 2009. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah)". Artikel Ilmiah Mahasiswa, Universitas Diponegoro.
- Putra, Ida Bagus dan Dwirandra, A.A.N.B. 2015. "Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali)". *E-Jurnal Akuntansi Udayana*. Vol.13 No.3 Hal.811-827, Desember.
- Rahmawati, Nur Indah. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Siswantoro, Nugroho. 2010. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umu Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)". *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Zulfa, Andria. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Aceh Utara Periode 2001-2012)". Artikel Ilmiah Mahasiswa, Universitas Malikussaleh.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.